



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **Bab I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, *event* pemilu memiliki peran penting bagi setiap masyarakatnya, di mana mereka menjalankan haknya sebagai rakyat dari Negara berdemokrasi untuk memilih pemimpin atau wakilnya dan menentukan nasib bangsa tersebut kedepannya.

Menurut J. Kristiadi (Suranto, et al, 2008:2) pemilu demokratis adalah "perebutan kekuasaan" dengan regulasi, norma, dan etika sehingga sirkulasi elit atau pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara damai dan beradab.

Pemilu memiliki peran penting dalam demokrasi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai proses pergantian dan sirkulasi kekuasaan elit penguasa secara kompetitif dan legal, sebagai pendidikan politik rakyat yang langsung, terbuka, bebas, dan massal, sebagai mekanisme untuk menentukan wakil-wakil rakyat baik dalam pemerintahan maupun legislatif, dan sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa sehingga kebijakan-kebijakannya menjadi absah. (Suranto, et al. 2008:2)

Pemilu seringkali dipandang sebagai momen sakral di mana harapan, gagasan dan cita-cita masyarakat dipertaruhkan. Di sini media berperan menjadi ruang terbuka atau wadah bagi harapan, gagasan dan cita-cita masyarakat tersebut

untuk dituangkan. Namun pada kehidupan berdemokrasi masyarakat Indonesia saat ini yang masih remaja, dalam “pemilu demokratis” tersebut sering terjadi praktik penipuan, kecurangan, serta *money politic*, untuk itu idealnya, media menjadi *Watchdog* yang mengawasi pemilu agar berlangsung dengan bebas dan adil.

Sayangnya, media peliputan pemilu seringkali terjebak, di mana media menyajikan berita “pacuan kuda”. Hari ini media mengeluarkan pernyataan serangan kandidat A terhadap kandidat B, kemudian di hari berikutnya, media yang sama mengeluarkan pernyataan serangan balik dari kandidat B terhadap kandidat A, begitu seterusnya. Tentu saja hal tersebut tidak menggambarkan kecerdasan media yang ideal dalam mensukseskan pemilu.

Dalam peliputan pemilu, idealnya adalah memberikan peliputan mengenai setiap kandidat atau parpol peserta pemilu dengan porsi yang sama, sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nomor 12/ 2003, ataupun UU Nomor 10/ 2008, yang mengharuskan media untuk menampilkan berita yang seimbang. Hal tersebut penting agar pemilih mendapat cukup informasi mengenai partai dan kandidat yang bertarung dalam pemilu.

Namun UU Pemilu tersebut yang menetapkan netralitas media yang ideal dalam pemilu, ditampik oleh Dewan Pers dalam jurnalnya edisi ke-3, bahwa tidak mungkin jika setiap media dapat meliput setiap kandidat atau parpol peserta pemilu dengan porsi yang seimbang. Pemikiran tersebut didukung dengan

data-data yang diperoleh ISAI (Institut Studi Arus Informasi) yang mengawasi pemberitaan yang terjadi selama pemilu pada tahun 1999 dan 2004.

Dalam Jurnal Dewan Pers (2010: 4) disebutkan bahwa pada pemilu 1999, terdapat 3.769 berita dari semua stasiun televisi selama masa kampanye. Dari total tersebut, sebanyak 2.785 berita, atau 73,9% nya didominasi oleh lima partai besar (PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan PAN). Sementara sisanya, sebanyak 29 partai kecil hanya memiliki 26,1% berita dari jumlah tersebut. Pada pemilu 2004, selama masa kampanye Pemilu Legislatif, total berita televisi mengenai parpol sebanyak 45,1% diisi oleh partai besar, dan sebanyak 54,9% berisi partai dengan suara kecil.

Dalam jurnalnya yang sama, Dewan Pers juga memaparkan beberapa contoh yang menggambarkan bagaimana media lokal cenderung menjadi corong dari elit politik lokal, terlebih saat menjelang pemilukada.

Salah satu contoh kasus yang fenomenal menurut Jurnal Pers tersebut, adalah ketika media lokal menjadi corong elit politik lokal adalah pada pertarungan politik di Gorontalo pada tahun 2003, diawali oleh berdirinya harian *Limboto Express*, oleh Ahmad Hoesa Pakaya, yang adalah Bupati Gorontalo, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar propinsi Gorontalo. Semenjak berdirinya, *Limboto Express* sangat kritis terhadap gubernur Gorontalo yang menjabat saat itu, Fadel Muhammad. Banyak pemberitaan yang mendiskreditkan Fadel Muhammad.

Berbeda dari *Limboto Express*, pemberitaan yang positif mengenai Fadel Muhammad selalu muncul di Koran *Gorontalo Pos*, yang termasuk dalam grup *Jawa Pos*, yang dikenal ramah terhadap Fadel. Atas pemberitaan-pemberitaan dalam *Limboto Express* yang mendiskreditkannya, Fadel bahkan mengadukan surat kabar tersebut kepada Dewan Pers.

Contoh lain yang paling dekat adalah kasus dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan kandidat dalam Pemilu Pilkada Banten 2011. Hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2011 menyebutkan bahwa yang keluar sebagai pemenang jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2012 adalah Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno.

Namun hasil pemungutan suara tersebut tidak diterima oleh dua pasangan kandidat lain, yaitu Wahidin Halim – Irna Narulita, dan Jazuli Juwaini – Muzaki. Menurut mereka suara tersebut tidak sah karena banyak kecurangan politik yang dilakukan oleh Atut – Rano. Dugaan kecurangan tersebut bahkan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti dan memohon diadakannya pemungutan suara ulang.

Setelah berjalan penyelidikan kasus tersebut berlangsung beberapa minggu, akhirnya pada tanggal 22 November 2011 diputuskan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh Atut – Rano tidak beralasan, dan tidak memiliki cukup bukti. Dengan begitu diputuskan bahwa tidak ada pemungutan suara ulang dan hasil pemungutan suara yang memenangkan pasangan Atut – Rano tersebut adalah

sah, seperti yang tertulis dalam *politikana.com* (25/11/11), yang berjudul “MK Menangkan Pilkada Banten kepada Pasangan Ratu Atut Chosiyah”.

Jika mundur ke belakang, Banten menjadi sebuah porovinsi sendiri pada tahun 2000 setelah sebelumnya bersatu dengan provinsi Jawa Barat. Keputusan tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2000. Setelah terbentuknya Provinsi Banten, pemerintah pusat memilih Hakamuddin Djamal untuk memimpin Banten dengan masa jabatan dari 17 November 2000 hingga 11 Januari 2002. Kemudian pada tahun 2002 DPRD Banten memilih Djoko Munandar untuk menggantikan Hakamuddin Djamal sebagai gubernur dan Ratu Atut Chosiyah sebagai wakilnya, melalui sebuah proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Di tengah masa jabatannya, pada tahun 2005, Hakamuddin Djamal dinonaktifkan karena terlibat kasus korupsi, maka dari itu, pada awal tahun 2006, Wakil Gubernur Ratu Atut Chosiyah menjalankan peran sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.

Pada tanggal 6 Desember 2006 Provinsi Banten mengadakan pemilu Pilkada secara langsung, setelah Pemilihan Gubernur kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan melalui perwakilan oleh Anggota DPRD Banten. Pilkada Banten tahun 2006 tersebut kemudian dimenangkan oleh pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Mohammad Masduki dengan masa jabatan 2007-2011.

Televisi lokal, dalam hal ini, *Cahaya TV Banten*, memiliki peran penting bagi masyarakat atau calon pemilih dalam *event* Pemilukada, di mana mereka

dapat mengenal lebih jauh setiap kandidat yang akan mereka pilih nantinya, melalui iklan, berita, program, debat kandidat, yang ditayangkan oleh media tersebut. Dengan begitu, para pemilih akan *well informed* tentang siapa yang akan mereka pilih.

Pemilukada Banten tentunya tidak lepas dari peliputan media lokal, dalam hal ini *Cahaya TV Banten*. *CTV Banten* merupakan televisi lokal pertama di wilayah Banten. Berdiri pada tahun 2002 dan mulai mengudara pada tahun 2004, di kanal 26 UHF/511 Mhz dengan daya 10.000 watt, selama 18 jam setiap harinya. Penyiaran *CTV Banten* menjangkau Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Bogor dan Jakarta.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam pemilihan gubernur suatu daerah, media televisi lokal seperti *Cahaya TV Banten* memiliki peran penting bagi masyarakat untuk mengenal para kandidat gubernur, dan sebaliknya bagi para kandidat untuk mempublikasikan dirinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja isi pemberitaan televisi lokal *Cahaya TV Banten* mengenai Pemilukada Banten 2011 berdasarkan fungsi media massa sebagai *watchdog* dalam pemberitaan pemilu

### **1.3. Tujuan penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan isi pemberitaan *Cahaya TV Banten* mengenai Pemilu Pilkada Banten 2011 berdasarkan fungsi media massa dalam pemberitaan pemilu.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Penelitian dalam Bidang Akademis**

Memberikan kontribusi bagi perkembangan teori normatif media massa yang dihubungkan dengan peliputan pemilu. Selain itu, secara metodologis, dalam penelitian ini juga diterapkan sejumlah kategori penilaian terhadap isi pemberitaan media massa, khususnya televisi lokal dalam pemilu lokal.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian dalam Bidang Praktis**

Memberikan masukan pada media lokal, khususnya televisi, bagaimana membuat peliputan atau program yang memberikan pengetahuan politik bagi audiensnya, agar tercipta masyarakat yang *well informed* secara rasional.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang disusun secara berkesinambungan dan sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:



## Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini dijabarkan latar belakang permasalahan, mengapa dan bagaimana penulis memilih topik penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, serta sistematikan penulisan

## Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjabarkan penelitian terdahulu, serta teori-teori yang menunjang dasar pemilikiran penelitian ini secara terperinci. Teori yang digunakan adalah teori tanggung jawab sosial, fungsi sosial media massa, konsep peliputan pemilu oleh media massa, dan konsep produksi berita TV.

## Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang mendasari penelitian ini. Definisi konseptual, definisi operasional, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data

## Bab IV Analisis Masalah

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini. Pada bagian awal, akan dijabarkan profil media lokal *CTV Banten*, khususnya program *news*. Sub bab berikutnya berisi hasil uji reliabilitas kategorisasi yang telah dilakukan, serta pembahasan permasalahan penelitian, yaitu mengenai bagaimana program *Hallo Banten* memberitakan *event*

Pemilukada Banten 2011, berdasarkan kategorisasi yang telah dibuat sebelumnya.

#### Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir dari skripsi ini memuat seluruh hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan serta beberapa saran dari penulis.